



DKI Siap Bangun Busway di Daerah Penyangga

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan keberadaan angkutan perbatasan terintegrasi bus Trans-Jakarta (APTJ) merupakan kesalahan Pemprov DKI pada masa lalu. Ia menduga trayek bus tersebut dikeluarkan dari hasil permainan oknum pemerintah dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda).

"Dahulu ada oknum pemerintah yang main trayek dengan Organda. APTJ itu kebijakan yang salah," kata Ahok di Balai Kota DKI, kemarin.

Menurutnya, konsep trayek APTJ yang beroperasi hingga daerah penyangga juga merupakan kesalahan. Seharusnya, layanan bus Trans-Jakarta yang merambah hingga perbatasan untuk mengangkut penumpang yang datang dari daerah penyangga.

Kini, ujarnya, Pemprov DKI Jakarta bahkan siap mengeluarkan dana untuk membangun jalur khusus bus Trans-Jakarta atau busway di kota penyangga. "Mereka butuh berapa? Besarnya Rp1 triliun atau Rp2 triliun, kami siap memberikan. Bupati dan wali kota daerah penyangga adalah teman baik. Mereka pasti bersedia Trans-Jakarta masuk ke wilayahnya, dan bukan APTJ yang masuk Jakarta," tutur Ahok.

Hal senada dikatakan pengamat transportasi publik Dharmaningtyas. Menurutnya, seharusnya bus APTJ beroperasi dari daerah penyangga dan dijadikan sebagai

"Dahulu ada oknum pemerintah yang main trayek dengan Organda. APTJ itu kebijakan yang salah."

Basuki Tjahaja Purnama
Gubernur DKI Jakarta

bus feeder untuk mengangkut warga daerah penyangga ke perbatasan Jakarta. "Memang operasionalnya sudah salah. Harusnya hanya menjadi pengantar warga dan (penumpang) membayar ongkos satu kali saat berangkat dari wilayah penyangga," katanya.

Saat ini, ujarnya, harus diperjuangkan agar operasional APTJ sampai tujuan dengan tarif yang sama dengan tarif bus Trans-Jakarta. Bila bus APTJ hanya beroperasi sampai perbatasan Jakarta, yang akan terbebani oleh ongkos bus ialah warga. "Tarif bus APTJ memang lebih mahal jika dibandingkan dengan bus umum reguler lainnya," imbuhnya.

Ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan subsidi kepada operator bus APTJ, seperti yang dilakukan kepada kereta listrik. Dengan begitu, jaringan operasional APTJ tidak menjadi beban warga di daerah penyangga. "Kereta commuter bisa disubsidi. APTJ pun bisa disubsidi sehingga setiap daerah tidak terbebani," ujarnya.

Berdasarkan pantauan, animo warga Kota Bekasi yang menumpang bus APTJ masih tinggi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bekasi, sedikitnya 4.000 warga kota itu menumpang bus APTJ menuju Jakarta setiap hari. Rencana operasional APTJ hanya sampai perbatasan membuat khawatir beberapa warga Bekasi. (Ssr/Gan/J-2)